

REFORMASI POLITIK DAN EKONOMI DI MYANMAR PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN U THEIN SEIN (2011-2013)

Oleh:

Devi Apriyanti

(deviapriyanti158@yahoo.com)

Pembimbing: Saiman Pakpahan. S.IP, M.Si

(saiman_pakpahan@yahoo.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Political and economic reform in Myanmar during the regime of President U Thein Sein year 2011-2013. The research aims to determine why the government of U Thein Sein do the political and economic reform in Myanmar, and to know the efforts to realize it. The hypothesis of the research that the reform conducted because of the authoritarian government, the lack of enforcement in human right, the weak and unstable economy, and the lack of labor freedom and press. This research used qualitative research methods with explanation analysis methods. Data collection techniques used are library research techniques. Based on the data obtained by the researchers that the government of President U Thein Sein have big influence in doing the political and economic reform in Myanmar and creating more democratic country. The things that have been realized in the field of politics are enforcement of human right, cabinet reshuffle, abolition of media censorship, freedom of speech and association for labor, and release of political prisoners. In the economy field, there are economic liberalization and legal guarantees for foreign investors.

Key Word: Myanmar, Reform, Democracy, Economy, Political

PENDAHULUAN

Negara Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris dan pada awal kemerdekaan bernama Burma. Myanmar merdeka pada tahun 1948, di bawah pemerintahan sipil U Nu yang menjalankan pemerintahan secara demokratis dan juga menerapkan sistem

parlementer. Pada tahun 1960 Myanmar melaksanakan pemilu dan Jenderal Ne Win dari Militer ditugaskan untuk menjaga ketertiban selama jalannya pemilu. Dari sanalah campur tangan dari pihak militer dimulai. Pada akhirnya Pemilu tahun 1960 terlaksana dengan baik dan dimenangkan kembali oleh U Nu dan partainya *Union*

Party. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan dalam negeri Myanmar, Pemerintahan Militer mengultimatum pemerintahan sipil selama 2 tahun untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Namun pemerintahan U Nu gagal dalam memperbaiki kondisi dalam negeri. Maka timbul ketidakpuasan dari kalangan militer dan pro-militer, akhirnya pada 2 maret 1962 militer melakukan kudeta di bawah pimpinan jenderal Ne Win. Kudeta tersebut berhasil dan hal tersebut merupakan awal keruntuhan demokrasi di Myanmar.¹ Oleh karena itu sejak tahun 1962 hingga tahun 2011 Myanmar di perintah oleh junta militer yang menghilangkan hak-hak untuk berpendapat dan juga memegang kekuasaan yang absolut dalam menghadapi berbagai kecaman dunia internasional serta sanksi.²

Di Myanmar Junta Militer yang pertama kali berkuasa adalah *Burma Socialist Programme Party* (BSPP) yang merupakan partai militer bentukan Jenderal Ne Win setelah melakukan kudeta militer pada 2 Maret 1962. kemudian terjadi kudeta yang kedua yaitu pada tahun 1988 yang akhirnya menggantikan BSPP yaitu *State Law and Order Restoration Council* (SLORC).³ SLORC kemudian dihapuskan dan dibentuk kembali The State Peace and Development Council (SPDC).

Presiden Thein Sein diangkat sebagai presiden sipil pertama sejak

berkuasanya junta militer selama 50 tahun tepatnya pada 4 Februari 2011 oleh parlemen setelah kemenangan partai USDP pada pemilu 2010 dan resmi dilantik pada 30 Maret 2011 bersama wakilnya Tin Aung Myint Oo dan Sai Mauk Kham. Di bawah pemerintahan Thein Sein banyak perubahan-perubahan besar yang telah terjadi untuk menuju negara demokrasi antara lain, pembebasan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, hingga pembukaan diri Myanmar ke dunia internasional. Pada Maret 2012 diadakan pemilu kembali, dan hasilnya partai NLD memenangkan 40 dari 45 kursi yang diperebutkan. Diharapkan hal ini dapat menjadi kemajuan besar yang membawa Myanmar menuju era kebebasan yang sebenarnya.⁴ Setelah kematian perdana menteri Soe Win pada tahun 2007, Thein Sein resmi menggantikan kedudukan Soe Win sebagai perdana menteri baru sejak Oktober 2007 hingga Februari 2011. Thein Sein pensiun dari militer pada 29 April 2010, dan memimpin partainya USDP maju untuk pemilu bersama dengan 22 pejabat militer lainnya.⁵

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teoritik yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan teori transisi demokrasi.

Teori Transisi Demokrasi menurut Samuel Huntington, yaitu demokratisasi pada tingkatan yang sederhana mencakup (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter, (2) dibangunnya sebuah rezim demokrasi, (3) konsolidasi demokrasi.⁶

¹ M. Adian Firnas. Jurnal Universitas Paramadina: *Prospek Demokrasi di Myanmar*. 2003. Vol. 2 No. 2. Januari. Hal. 129-130.

² *Myanmar Profile*, diakses dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990563>, 4 desember 2013. Pukul 09.30

³ Fajar Kurnianto: *Prospek Demokrasi Myanmar Setelah Pemilu*. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/27/prospek-demokrasi-myanmar-setelah-pemilu>. 4 Desember 2013. pukul. 12.30.

⁴ Khanisa Krisman : *Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar*. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html>. 4 Desember 2013. pukul 13.00

⁵ Fathimatuz Zahroh: *Biografi Thein Sein*. Diakses dari: <http://profil.merdeka.com/mancanegara/t/thein-sein/>. 4 Desember 2013. Pukul 14.27

⁶ Samuel Huntington. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Grafiti: Jakarta. Hal. 44.

Pemilu pada 7 November 2010 tersebut sebagai titik balik atau masa transisi pemerintahan Myanmar. Sebelum Pemilu, pada Oktober 2010 pemerintah Myanmar telah melakukan pengumuman bahwa adanya pergantian nama Myanmar dan juga bendera. Perubahan nama Myanmar menjadi *Republic of Myanmar* yang mana sebelumnya adalah *Union of Myanmar*. Sementara itu perubahan bendera dilakukan untuk meninggalkan era sosialis atau otoritarian militer. Bendera Myanmar yang baru menampilkan garis-garis horizontal kuning, hijau dan merah dengan bintang putih besar. Perubahan bendera secara tiba-tiba ini disertai dengan adanya instruksi untuk pengibaran bendera secara langsung yaitu tepatnya pada 21 Oktober 2010.⁷

Pada Maret 2012 diadakan pemilu kembali, dan hasilnya partai NLD memenangkan 40 dari 45 kursi yang diperebutkan. Diharapkan hal ini dapat menjadi kemajuan besar yang membawa Myanmar menuju era kebebasan yang sebenarnya.⁸

PEMBAHASAN

A. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI MYANMAR SEBELUM ADANYA REFORMASI POLITIK DAN EKONOMI

1. Pemerintahan yang Otoriter

Myanmar telah berada di bawah kekuasaan militer selama hampir 50 tahun. Kekuasaan militer Myanmar merupakan yang paling lama dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang sebagian juga mengalami masalah yang sama dalam sistem pemerintahannya. Pemerintah Junta Militer Myanmar bahkan melakukan perpanjangan kekuasaan tanpa melihat adanya kemunduran ekonomi yang

terjadi dan juga perkembangan pembangunan yang sangat lambat. Selama hari-hari berkuasanya Junta Militer, bisa dikatakan tiada hari tanpa adanya tindakan kekerasan dan penindasan. Banyak larangan-larangan yang terjadi dan aturan-aturan yang membuat rezim ini semakin kuat berkuasa, diantaranya dilarangnya lebih dari lima orang berkumpul tanpa izin dan jika melanggar akan dianggap sebagai suatu pemberontakan dan dipenjara. Selain itu juga banyak terjadi pelecehan, pemenjaraan lawan politik dan dominasi yang besar terhadap lembaga-lembaga politik.⁹ Tidak hanya itu banyak para demonstran yang tewas dan bahkan dipenjara karena mengeluarkan pendapat atau tidak setuju atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer.

Pemerintah Junta Militer lebih mementingkan menghabiskan dana yang sangat besar untuk pengeluaran-pengeluaran dalam bidang kemiliteran dibandingkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Myanmar.

Berkuasanya rezim Junta militer telah mengambil alih dari seluruh bagian kehidupan di Myanmar. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat mutlak dan absolut atas apapun di Myanmar. Antara lain seperti pendidikan, budaya, institusi sosial yang independen. Sementara di dalam kehidupan masyarakat sipil seperti organisasi-organisasi bantuan yang kecil, beberapa kelompok perwakilan bisnis, badan keagamaan, badan adat tetap berfungsi selama kekuasaan Junta Militer namun tidak ada satupun dari organisasi-organisasi tersebut yang dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya kritikan apalagi menentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Aktor-aktor masyarakat sipil ini pada umumnya terpinggirkan dan dibebani dengan

⁷ Sean Turnell. "Myanmar In 2010." Asian Survey, Vol 51. Issue 1. 02/2011, Hal 148 - 154

⁸ Khanisa Krisman : *Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar*. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html>. 4 Desember 2013. pukul 130.0

⁹ Sean Turnell. "Myanmar's Fifty-Year Authoritarian Trap." *Journal of International Affairs*. 2011. Vol. 65. Issue. 1. Hal. 79.

berbagai tugas di bidang kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan yang seharusnya adalah tanggung jawab negara.

Junta militer yang otoriter telah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan pada rakyat Myanmar, angka kemiskinan sangat besar terutama di daerah pedesaan karena memiliki akses yang terbatas pada pembangunan ekonomi dan juga investasi.¹⁰

2. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM)

Rakyat Myanmar telah menderita selama dua generasi di bawah kediktatoran militer yaitu pada masa kudeta militer oleh jenderal Neh Win dan yang kedua yaitu Jenderal Than Shwe. Ekonomi, hukum, sosial, keberagaman budaya, kebebasan politik semua mengalami penurunan selama masa kekuasaan tersebut. Catatan terhadap Hak Asasi Manusia di Myanmar tercatat sebagai yang paling buruk di dunia. Akibatnya banyak negara-negara yang memberikan tanggapan atas tindakan tersebut, terutama negara Barat yang umumnya memberikan hukuman diplomatik seperti pengenaan terhadap sanksi ekonomi, penarikan bantuan dan kerjasama internasional.¹¹

Masalah HAM menjadi isu yang paling sensitif, karena penyalahgunaan dan juga pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat ditentang oleh dunia internasional. Pelanggaran dan kekerasan yang sering dilakukan oleh Junta Militer merupakan hal yang sangat sering terjadi. Dilarangnya masyarakat berorganisasi serta melakukan pembicaraan dan diskusi,

dilarang menentang pemerintah dan berdemonstrasi serta tingginya angka pelecehan. Selain itu militer juga melakukan tindakan kekerasan terhadap oposisi yang mana hal ini merupakan hal yang tidak boleh dilakukan.

PBB melaporkan tentang Hak Asasi Manusia di Myanmar pada tahun 2002. Dilaporkan bahwa telah terjadi perbudakan penduduk sipil untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur, anak-anak dipaksa untuk masuk militer dan menjadi tentara, terjadinya pemerkosaan anak perempuan di seluruh Myanmar yang dilakukan oleh militer. Tidak ada yang berani menentang semua kejahatan tersebut karena rezim militer membungkam semua pembangkang politik dengan ancaman penahanan, penyiksaan dan kematian. Akibat pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dan juga melakukan pengurusan ekonomi yang salah menyebabkan rakyat Myanmar dalam keadaan kemiskinan yang sangat ekstrim.¹² Ditambah lagi pencabutan investasi asing, hal ini membuat tekanan ekonomi semakin besar. Namun tetap saja pemerintah tetap menghabiskan dana yang sangat besar untuk kepentingan militer.

Di daerah perang etnis, banyak korban perang yang meninggal di daerah di mana gencatan senjata itu telah disepakati, bahkan pemerintah menyetujui adanya pergerakan yang lebih besar mengenai perang etnis tersebut. Keadaan pelanggaran HAM semakin parah ditambah lagi adanya kerja paksa yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat sipil. Prihatin akan hal ini, PBB akhirnya mengirimkan laporan spesial dalam bidang Hak Asasi Manusia setiap tahunnya yang mana diangkat pada tahun 1992. Pada tahun 2000 *International Labour Organizations* (ILO) menyerukan sanksi atas tindakan rezim otoriter tersebut. ILO

¹⁰ 2001. "Myanmar: General Outlook." Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

¹¹ David Kinley & Trevor Wilson. 2007. "Engaging a Pariah, Human Rights Training In Burma/Myanmar." Human Rights Quarterly. Vol. 2. Issue. 2. Mei. Johns Hopkins University: Baltimore. Hal. 368-402.

¹² Zachary T Elsea. 2003. "Myanmar's Facade." Harvard International Review. Vol. 25. Issue. 01. Harvard International Relations Council: Cambridge. Hal. 13-14.

pertama kali menyerukannya kepada negara-negara anggotanya.¹³ Oleh karena itu masalah Hak Asasi Manusia merupakan isu utama yang diangkat ketika terjadi reformasi politik di Myanmar.

Banyak perempuan dan bahkan remaja perempuan dipaksa untuk melakukan kerja prostitusi tidak hanya dalam kawasan Myanmar namun bahkan melalui lintas negara. Sebagian besar mereka dibawa ke Thailand untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Selain itu masalah ini juga tidak berakhir karena pemerintah militer tidak peduli dengan masalah ini ditambah lagi pemerintah Thailand yang juga menutup mata atas masalah ini. Menurut Asia Watch yang merupakan kelompok HAM Amerika Serikat, terdapat 20.000 lebih wanita Myanmar dijadikan sebagai budak di Thailand dari berbagai sektor pekerjaan. Umumnya mereka dipekerjakan di rumah bordil, pembantu rumah tangga, koki, tukang cuci, pelayan dan lain sebagainya.¹⁴ Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ini sudah dianggap sesuatu yang wajar dan lumrah karena masyarakat umumnya telah menyaksikannya selama berpuluh-puluh tahun sejak berkuasanya Junta Militer.

3. Perekonomian yang Lemah dan tidak Stabil

Dalam bidang ekonomi, sejak dahulu Myanmar merupakan negara yang bergantung pada pertanian. Keadaan infrastruktur pertanian Myanmar tidak jauh berbeda dengan infrastruktur berpuluh-puluh tahun yang lalu. Meskipun begitu dalam hal keamanan pangan Myanmar telah berhasil membuat tanaman padi dengan hasil yang tinggi kedua dengan beberapa mekanisme terbatas. Dengan ketergantungan yang besar pada pertanian,

hal ini menyebabkan pemasukan terbesar negara itu berasal dari pertanian dengan 57,2 persen dari *Gross Domestic Products* (GDP) pada tahun 2002, industri hanya mengambil 7,8 persen dari GDP pada tahun 2002. Gas alam telah menggantikan ekspor utama dari padi sebelumnya, dan juga yang kedua adalah pakaian kebanyakan merupakan impor dari negara lain.

Tahun 1999 bukan merupakan tahun yang baik bagi Myanmar, pada tahun ini ekonomi Myanmar mengalami krisis. Selain itu secara politik tidak ada pertemuan damai ataupun dialog yang dilakukan pemerintah junta militer saat itu yaitu *the State Peace and Development Council* (SPDC) kepada *National League for Democracy* (NLD). Ekonomi Myanmar pada saat itu semakin memburuk, karena dapat dilihat pada kehidupan masyarakat yang semakin menurun, selain itu *World Bank* juga melaporkan adanya kekurangan gizi yang bersifat darurat terhadap anak-anak di Myanmar. Krisis dalam layanan pendidikan dan kesehatan juga terjadi yang semakin menambah kompleks masalah yang ada. Dalam dunia internasional saat itu keadaan Myanmar juga dalam keadaan terisolasi dan juga adanya sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Myanmar. Hubungan dengan negara tetangga Thailand juga semakin memburuk, yang mana menambah Myanmar semakin terpuruk ekonominya.¹⁵ Situasi ekonomi yang sangat buruk di Myanmar dianggap juga disebabkan karena adanya manajemen yang salah. Terjadinya inflasi yang besar, krisis perbankan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta tingginya angka kemiskinan Myanmar dapat diartikan

¹³ Ed. Karen Christensen & David Levinson. 2002. "Myanmar – Human Rights." *Encyclopedia of Modern Asia*. Vol. 4. Charles Scribner's Sons: New York. Hal. 265-268.

¹⁴ 1994. "The Slaves From Myanmar." *The Economist*. The Economist Intelligence Unit: London. Hal. 32.

¹⁵ Tom Wingfield. 2000. "MYANMAR: Political Stasis and a Precarious Economy." *Southeast Asian Affairs*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.

negara ini gagal dalam mensejahterakan rakyatnya.

4. Masalah Kebebasan Buruh dan Pers

Myanmar memiliki catatan yang sangat buruk mengenai hak-hak tenaga kerja atau buruh. Padahal buruh merupakan perhatian utama yang akan dinilai oleh investor asing sebelum mereka menginvestasikan uang mereka. Rezim Junta Militer Myanmar memiliki sejarah mengenai adanya perlakuan yang tidak semestinya terhadap buruh bahkan kebanyakan dari mereka adalah korban kerja paksa untuk infrastruktur dan proyek-proyek lainnya. Pada Juni 2006, *International Labour Organizations* (ILO) menuntut untuk dilakukannya perbaikan terhadap hak-hak buruh di Myanmar. Selain itu ILO juga menyerukan perdamaian terhadap rezim yang berkuasa saat itu yaitu *State Peace and Development Council* (SPDC). Namun pada Oktober 2006 terjadi penangkapan terhadap buruh-buruh yang mengeluh dan menuntut hak-hak mereka.¹⁶

Kerja paksa yang dilakukan oleh Junta Militer telah terlaksana secara sistematis dan pada skala yang semakin besar. Sebagian besar mereka bekerja pada kereta api, jalan, konstruksi dan infrastruktur lainnya serta yang berhubungan dengan promosi pariwisata Myanmar. Meskipun mendapat berbagai kecaman dari berbagai pihak, namun tampaknya tidak ada keinginan rezim Junta Militer untuk mengakhiri kerja paksa tersebut. Ratusan ribu pekerja paksa di Myanmar bekerja dengan sangat ekstrim dan tidak jarang kebanyakan dari mereka

meninggal dunia.¹⁷ ILO pada tahun 2005 telah merekomendasikan kepada para anggotanya untuk memberikan sanksi atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Myanmar, dan sebagian besar dari anggotanya telah melakukan hal tersebut. Antara lain sanksi berupa blokade ekonomi, larangan impor dan juga transaksi keuangan.

Sistem otoritarian yang dilaksanakan oleh rezim Junta Militer membawa kehidupan rakyat Myanmar penuh dengan penderitaan dan juga membuat mereka kehilangan hak-hak mereka. Myanmar selama pemerintahan Junta Militer mengalami masalah yang sangat kompleks, diantaranya ekonomi yang sangat lemah dan tidak stabil, angka kemiskinan yang tinggi, tidak adanya kebebasan bersuara dan berorganisasi, tidak adanya kebebasan dan hak buruh dan pada umumnya mereka malah dieksploitasi, masalah lainnya yaitu ditambah lagi dengan tidak adanya kebebasan terhadap pers atau media. Tidak adanya kebebasan pers di Myanmar ditunjukkan dengan adanya larangan penulisan terhadap isu-isu tertentu seperti masalah Hak Asasi Manusia dan tahanan politik.

Selama masa itu, banyak surat kabar yang dilarang terbit karena dianggap melanggar aturan yang dibuat oleh Junta Militer. Pada tahun 2010 sebelum terjadinya reformasi politik dan ekonomi di Myanmar, *Reporters Without Borders* melaporkan bahwa Myanmar menduduki urutan ke 171 dari 175 negara diseluruh dunia untuk indeks kebebasan persnya.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa negara Myanmar tidak memiliki kebebasan pers

¹⁶ 2006. "Myanmar Economy: Concern Over Labour Rights." EIU ViewsWire. The Economist Intelligence Unit: New York.

¹⁷ Patrick Bolle. 1998. "Supervising Labour Standards and Human Rights: The Case of Forced Labour in Myanmar (Burma)." *International Labour Review*. Vol. 137. Issue. 3. International Labour Office: Geneva. Hal. 391-409.

¹⁸ "Press Freedom Indeks 2010." *Reporters Without Borders*. Diakses dari: http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1001. Tanggal 27 Maret 2014. Pukul. 22.35.

di negaranya. Pers cenderung di manipulasi dan digunakan untuk kepentingan dan pencitraan diri oleh rezim Junta Militer.

Pendiri *Eleven Media* sebuah surat kabar di Myanmar yaitu Than Htut Aung merupakan seorang aktivis yang menginginkan adanya kebebasan pers pada masa Junta Militer, oleh karena itu melalui tulisannya dikoran dia terkadang mengkritik berbagai tindakan yang dilakukan rezim tersebut namun dengan menggunakan kata-kata yang kreatif dan tidak terang-terangan namun maksudnya dapat ditangkap oleh masyarakat Myanmar. Banyak yang menyukai gaya tulisannya pada saat itu, namun dibalik itu tentu juga ada yang tidak suka yaitu pihak militer. Akhirnya pada tahun 2003 kantor *Eleven Media* diduduki oleh militer setelah munculnya tulisan-tulisan Than Htut Aung yang membahas tentang pembantaian-pembantaian sipil yang dilakukan oleh rezim Junta Militer.

Than Htut Aung ditahan akibat hal tersebut. Namun tidak hanya Than karena banyak wartawan-wartawan lainnya yang juga di tahan karena di anggap menerbitkan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah dan hanya akan memperburuk citra pemerintah.

Kasus tersebut merupakan fakta bahwa benar-benar tidak ada yang namanya kebebasan pers di myanmar. Pemerintah tidak menginginkan semua kekejaman dan kekerasan yang dilakukannya dipublikasikan dan membangkitkan rakyat untuk melakukan reformasi dan menurunkan rezim militer tersebut. Oleh karena itu cara yang dapat dilakukannya adalah mengawasi kinerja pers secara ketat tentang apa yang mereka publikasikan dan tulis dalam setiap tulisan yang mereka terbitkan. Pemerintah bahkan cenderung akan mengendalikan dan memegang kekuatan pers. Dengan begitu pemerintah dapat seenak-enaknya menggunakan pers sebagai alat untuk mengambil opini publik dan melakukan pencitraan yang baik terhadap kinerjanya.

Karena semua masalah diataslah yang mendorong presiden U Thein Sein melakukan reformasi, baik itu di bidang politik dan ekonomi. Upaya ini dilakukannya untuk menciptakan myanmar sebagai negara yang liberal yang menganut asas-asas demokrasi dan menjunjung tinggi hak dasar individu. Selain itu juga untuk memajukan Myanmar di bidang ekonomi serta menghapuskan kemiskinan di Myanmar yang selama ini menderitakan rakyat terutama pada masa-masa Junta Militer.

UPAYA PEMERINTAH MYANMAR DALAM MELAKUKAN REFORMASI POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN U THEIN SEIN

1. Reformasi Politik

a. Perombakan kabinet

Perombakan kabinet (*Cabinet Reshuffle*) merupakan kebijakan yang dilakukan presiden U Thein Sein yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menyingkirkan pihak-pihak yang radikal atau anti reformasi. Pihak-pihak seperti ini dianggap sangat membahayakan oleh pemerintah U Thein Sein karena dianggap dapat mengganggu reformasi politik dan ekonomi yang sedang berjalan di Myanmar. Pada tanggal 27 Agustus 2012 presiden U Thein Sein mengumumkan di situs resminya bahwa akan ada perombakan kabinet, perombakan ini merupakan yang terbesar semenjak U Thein Sein menjabat sebagai presiden dan meruntuhkan kekuasaan Junta Militer Myanmar.

Dalam situs resminya tersebut presiden mengatakan bahwa dia akan melakukan perubahan terhadap 9 kursi dari 29 pos dalam kabinetnya. Selain itu perombakan ini juga menghasilkan 15 orang diangkat sebagai deputi menteri baru. Secara keseluruhan pada reformasi kabinet tersebut terdapat 20 menteri yang direshuffled, 2 mengundurkan diri dan ada

20 wakil menteri yang ditunjuk. Serta dalam *Cabinet Reshuffel* ini terdapat pengangkatan dan pengakuan terhadap perempuan. Kabinet baru ini sebagian besar berasal dari sipil dan teknokrat. Kabinet baru ini menandakan jauhnya politik dan pemerintahan dari dominasi pihak militer. Hanya ada 3 posisi dalam kabinet yang dipegang oleh perwira militer aktif, meskipun begitu mereka juga jauh dari pengaruh junta militer dari beberapa dekade terakhir.¹⁹

b. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dengan berkuasanya pemerintahan presiden U Thein Sein sejak tahun 2011, otomatis merubah segala bentuk aturan yang dianggap tidak sesuai dengan jalannya reformasi dan demokratisasi di Myanmar. Hal yang paling mendasar di lakukannya adalah membentuk *Myanmar National Human Rights Commission* (MNHRC) pada 5 September 2011.²⁰ MNHCR berbasis di Yangon, dan didirikan atas perintah eksekutif dari presiden U Thein Sein secara langsung. Tujuan dibentuknya komisi ini adalah bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Komisi ini memiliki 15 anggota komisi yang berperan penting. Para anggota yang bekerja di komisi ini secara umum memiliki latar belakang militer, sipil, dan akademisi. Tiga orang merupakan duta, dua orang jenderal, tiga orang yaitu sebagai profesor, dan yang lain bertugas di berbagai kapasitas sebagai pejabat

¹⁹ 2012. "New Super Cabinet Drives Rapid Change." Ft.Com. The Financial Times Limited: London.

²⁰ 2012. "The Rule Of Myanmar: Challenges and Prospects". Report of the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI). International Bar Association: London. Dikutip dari: <http://burmanationalnews.net/burma/images/Documents/ibahriruleoflawnmyanmarchallengesandprospects201212.pdf> Tanggal: 08 April 2014. Pukul 17.39.

pemerintah. Selain itu tiga orang dari anggota komisi merupakan perempuan.

c. Penghapusan Sensor Terhadap Media

Penghapusan sensor terhadap media merupakan salah satu bentuk kebebasan. kebebasan ini sebagai rangkaian dari reformasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah presiden U Thein Sein. Kebebasan untuk berekspresi ini telah diatur oleh presiden U Thein Sein yang tertuang dalam Media Law. Sejak awal jabatannya pada Maret 2011 presiden U Thein Sein telah memberlakukan pelonggaran terhadap sensor media. Penghentian penyensoran ini sebagai awal dilakukan pada naskah-naskah politik dan religius termasuk untuk pemberitaan. Sebelumnya Myanmar di bawah Junta Militer melakukan sensor terhadap semua pemberitaan, termasuk yang menyoroti olahraga, hiburan, kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Langkah reformasi di bidang media ini dianggap juga telah meringankan biaya penerbitan, selain itu langkah reformasi ini semakin meringankan sanksi bagi negara-negara Barat sebelumnya yang telah menghimbau kuat akan masalah politik dan tidak adanya kebebasan di Myanmar. Sejak dikuasai Junta militer dari tahun 1962 hingga 2010, tidak ada yang namanya kebebasan pers di Myanmar dan masyarakat juga tidak ada yang berani memberikan suara. Oleh karena itu pada masa-masa tersebut ada 140 publikasi termasuk 60 terbitan mingguan yang setiap awal minggu harus menyerahkan teksnya untuk dicermati badan sensor, sebelum naik cetak.²¹ *Reporters Without Borders* melaporkan mengenai ranking kebebasan pers di dunia, pada tahun 2013 Myanmar berada pada urutan 151 dari 179 negara di dunia. Myanmar naik sebanyak 18

²¹ 2012. *Myanmar Longgarkan Sensor*. DW Akademie. Dikutip dari: <http://www.dw.de/myanmar-longgarkan-sensor/a-16178940-1>. Tanggal: 09 April 2014. Pukul: 12.18

peringkat dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 169. Perbandingan masa pemerintahan U Thein Sein dengan masa pemerintahan Junta Militer memiliki kebebasan pers yang sangat jauh berbeda. Sebelum berkuasanya presiden U Thein Sein yaitu pada tahun 2009 Myanmar berada di peringkat 174 dari 178 negara di dunia.²²

d. Kebebasan berpendapat dan berserikat bagi buruh

Sebagai bagian dari reformasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden U Thein Sein, maka pada Maret 2012 pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai Hak-hak pekerja atau buruh. Hal ini merupakan sebagai bentuk pengakuan hak oleh negara terhadap pekerja dan juga untuk menunjang terjadinya demokratisasi. Undang-undang tersebut berisi adanya kebebasan kepada para buruh untuk mendirikan serikat pekerja dan juga melakukan mogok, serta berdemonstrasi untuk memberikan pendapat. Selain itu undang-undang juga memperkenalkan adanya hukuman bagi majikan yang memecat pekerjaanya karena mogok.

Undang-undang kebebasan buruh ini diatur dalam undang-undang Myanmar yaitu *The Settlement of Labour Dispute Law* (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012).

e. Pembebasan Tahanan Politik

Namun, semenjak berkuasanya pemerintahan sipil U Thein Sein, hak hidup dan hak-hak dasar rakyat telah dijamin dan ditetapkan di dalam undang-undang. Karenanya selama masa pemerintahan U Thein Sein telah banyak pemberian amnesty kepada para tahanan dan juga banyak para tahanan yang telah dibebaskan. Presiden U Thein Sein sendiri mengatakan bahwa pembebasan tahanan

politik ini dilakukan untuk menghormati azas-azas politik dan memungkinkan bagi mereka yang dibebaskan dapat membantu bagi jalannya pembangunan bangsa.

Sepanjang tahun 2011 presiden U Thein Sein telah membebaskan sekitar 800 tahanan politik. Kemudian pada November 2012 presiden kembali membebaskan tahanan politik sebanyak 452 orang, hal ini juga dikarenakan sebagai penyambutan dari rencana kunjungan presiden Amerika Serikat Barack Obama.²³ Untuk mendukung dan membantu tahanan politik terdapat sebuah organisasi internasional yang dikelola oleh mantan tahanan politik. Organisasi internasional ini bernama *The Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP). Organisasi ini khusus bekerja di Myanmar.

Tujuan AAPP adalah untuk secara aktif berkampanye untuk pembebasan seluruh tahanan politik di Myanmar. AAPP juga memberikan bantuan kepada para mantan tahanan yaitu dengan tiga program yang besar yaitu, yang pertama *Assistance Program for Political Prisoners*, kedua *Mental Health Assistance Program*, dan yang ketiga yaitu *Educational and Vocational Support*.²⁴

2. Reformasi Ekonomi

a. Liberalisasi Ekonomi

Reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah U Thein Sein sendiri bertujuan untuk menstabilkan keadaan ekonomi Myanmar dan juga untuk mengentaskan kemiskinan di Myanmar. Presiden U Thein Sein pada awal menjabat sebagai presiden Myanmar telah membuat beberapa rencana ekonomi untuk

²² *Press Freedom Index*. Reporters Without Borders. Dikutip dari: http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubrique=1034. Tanggal: 09 April 2014. Pukul 13.05.

²³ *Jelang Kunjungan Obama, Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan*. Solopos.Com. Dikutip dari: <http://www.solopos.com/2012/11/15/jelang-kunjungan-obama-myanmar-bebaskan-ratusan-tahanan-348020>. Tanggal: 09 April 2014. Pukul 09.59.

²⁴ 2013. *Annual Report 2013*. Assistense Associations for Political Prisoners. Dikutip dari: [http://www.aappb.org/Annual_Report_2013\(Eng\).pdf](http://www.aappb.org/Annual_Report_2013(Eng).pdf). Tanggal: 09 April 2014. Pukul 10.34.

Myanmar, antara lain yaitu: kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan perkapita *Gross Domestic Product* (GDP) untuk mengentaskan kemiskinan, memprioritaskan industrialisasi, karena industrialisasi sebagai prioritas maka diperlukan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang menarik, agar FDI dapat menarik maka beberapa kendala perlu dihapus dan diperlukan infrastruktur yang tepat. Sebagai bagian dari rencana ekonomi 5 tahun (2011/2012-2015/2016), pemerintah telah menetapkan sendiri target untuk mencapai tingkat rata-rata pertumbuhan GDP sebesar 7,7%, dan peningkatan pangsa manufaktur di GDP dari 26,0 % menjadi 32,1 %, dan penurunan pangsa pertanian dari 36,4 menjadi 29,2 % pada fiskal akhir tahun 2015/2016.²⁵

Liberalisasi dilakukan oleh pemerintah di berbagai bidang, baik itu telekomunikasi, energi, industri dan sebagainya. Dalam bidang energi sendiri Myanmar telah melakukan ekspor gas dan gas merupakan masukan pendapatan negara yang besar bila dibandingkan pendapatan negara di bidang pertanian dan manufaktur. Pada 15 Januari 2013, pemerintah mengundang investor asing untuk mendaftarkan ketertarikan mereka terhadap penawaran untuk dua dari empat lisensi telekomunikasi nasional. Dengan adanya peningkatan situasi politik di Myanmar membuat negara ini menjadi tempat paling dicari untuk pasar telekomunikasi baru di Asia.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menjadikan bank sentral sebagai prioritas

utama untuk membentuk kestabilan nilai tukar mata uang Myanmar Kyat terhadap dollar. Nilai tukar yang stabil akan menambah kepercayaan domestik dan juga pebisnis dalam menilai keadaan ekonomi Myanmar. Pemerintah berusaha untuk menggeser nilai tukar dengan membuat ekspor menjadi lebih murah bagi pihak asing. Untuk jangka waktu yang panjang, pembangunan yang seimbang dapat dipastikan dengan adanya ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja industri mengurangi ketergantungan dari eksploitasi sumber daya alam.

Beberapa investasi yang sederhana telah terjadi di sebagian besar sektor yang sebelumnya mendapat perhatian dari investor Asia: energi, gas alam dan terutama tenaga air, dan pertambangan. Ada sekitar US \$ 133 juta nilai *Direct Foreign Investment* (FDI) pada tahun fiskal Juli 2012. Manufaktur merupakan bidang yang baru bagi Myanmar, oleh karena itu manufaktur hanya sedikit mengalami pertumbuhan. Dorongan untuk ekspor manufaktur diberikan oleh Eropa, namun dorongan untuk ekspor manufaktur diberikan ketika Uni Eropa memutuskan untuk membawa Myanmar kembali ke *Generalized System of Preferences* (GSP), yang dirancang untuk memberikan barang-barang negara-negara berkembang ke tingkat tarif yang spesial. Sementara itu, mata uang yang kuat telah mendorong impor sejumlah besar kendaraan bermotor dan suku cadang, untuk pertama kalinya dalam lima dekade. Terjadi penghapusan monopoli impor mobil yang mana sebelumnya dipegang oleh dua perusahaan besar.²⁶

b. Jaminan Hukum Bagi Investor Asing

²⁵ Ikuko Okamoto. 2013. *Comment on "Toward Myanmar's New Stage of Development: Transition from Military Rule to the Market"*. Asian Economic Policy Review. Vol 8. Issue 1. Hal: 120–121. Dikutip dari: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aepr.12011/full>. Tanggal: 11 April 2014. Pukul 11.50.

²⁶ Robert H Taylor. 2013. *Southeast Asian Studies: Myanmar In 2012, myaw ta lin lin or Great Expectations*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore. Hal: 191-203. Dikutip dari: <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/1508526113>. Tanggal: 11 April 2014. Pukul: 14.24

Sistem hukum Myanmar selama beberapa tahun terakhir telah mengalami banyak perubahan sejak terjadinya reformasi yang dilakukan di bawah pemerintahan presiden U Thein Sein. Salah satu hukum yang berubah adalah hukum mengenai investor asing. Hukum mengenai investor asing ini disahkan oleh parlemen Myanmar pada awal bulan September 2012. Hukum ini diatur dalam *The Foreign Investment Law* (The Pyidaungsu Hluttaw Law No 21/2012) dan telah disahkan oleh Presiden yang merupakan penggantian dari hukum sebelumnya *Myanmar Foreign Investment Law* (MFIL) tahun 1988.

Perubahan besar yang terjadi dalam hukum investor asing ini dibandingkan dengan hukum sebelumnya adalah jumlah besarnya investasi yang harus diberikan oleh investor asing. Hukum yang baru menghilangkan pasal persyaratan penyertaan modal minimal US\$5 juta bagi calon investor asing saat mulai mengelola usaha dengan mitra lokal. Selain itu perubahan lainnya adalah mengenai batasan kepemilikan saham bagi investor asing bisa mencapai 50 persen dari sebelumnya yang hanya mencapai 49 persen.²⁷

International Monetary Fund (IMF) memuji kinerja Myanmar yang telah berhasil membuat peraturan mengenai pajak, selain itu dengan diselesaikannya dan disahkannya undang-undang investasi asing maka IMF menggambarkan bahwa hal ini adalah kesempatan bersejarah bagi Myanmar untuk menjadi negara Asia dengan ekonomi yang besar.

Hukum Investasi Asing Myanmar juga diperbaharui pada tahun 2013. Pada hukum yang baru ini mengatur tentang ketentuan penggunaan lahan, struktur

²⁷ Niken Ari Purwanti. 2012. *Parlemen Myanmar Loloskan UU Investasi Asing*. Solopos. Dikutip dari: <http://www.solopos.com/2012/09/07/parlemen-myanmar-loloskan-uu-investasi-asing-326258>. Tanggal: 12 April 2014. Pukul: 15.22.

hukum dan insentif bagi perusahaan asing adalah hal-hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para investor asing setelah Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya meringankan sanksi mereka terhadap Myanmar.²⁸

KESIMPULAN

Myanmar merupakan negara yang otoriter yang dikuasai oleh Junta Militer selama hampir 50 tahun, dan kembali dikuasai oleh pemerintahan sipil setelah dilantiknya U Thein Sein sebagai presiden Myanmar pada 30 Maret 2011. Setelah dilantik pemerintah U Thein Sein segera melakukan perubahan-perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi di Myanmar. Pemerintah U Thein Sein melakukan reformasi di bidang politik dan ekonomi. Alasan dilakukannya reformasi ini karena Myanmar pada saat itu mengalami masalah yang sangat kompleks, yang mana menurut U Thein Sein perlu untuk melakukan perubahan untuk menjadikan Myanmar negara yang sejahtera dan maju. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah adanya pemerintahan yang otoriter, masalah Hak Asasi Manusia, adanya perekonomian yang lemah dan tidak stabil, serta tidak adanya kebebasan buruh dan juga pers.

Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan Myanmar negara yang lebih demokrasi dan mengedepankan hak-hak manusia. Selain itu juga reformasi ini juga berusaha agar Myanmar dapat menciptakan perekonomian yang lebih maju dan meningkatkan kehidupan rakyat Myanmar. Semua bentuk reformasi ini pada akhirnya merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah U Thein Sein untuk melakukan perubahan-perubahan besar di Myanmar. Reformasi

²⁸Gwen Robinson & Robin Harding. 2012. *Financial Times: Myanmar finalises investment law*. The Financial Times Limited: London. Dikutip dari: <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/101163511> 7. Tanggal: 12 April 2014. Pukul 17.44

ini telah lama ditunggu oleh rakyat Myanmar dan bahkan diperkirakan tidak akan pernah terjadi. Akhirnya reformasi terjadi dan membawa suasana baru yang lebih baik di Myanmar.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa reformasi ini tidak hanya dibutuhkan usaha keras dari pemerintah tetapi juga perlu adanya dukungan yang kuat dari rakyat Myanmar untuk mewujudkan negara yang demokrasi yang sejati dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Huntington, Samuel. 1991. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Grafiti: Jakarta.
- Bolle, Patrick. 1998. "Supervising Labour Standards and Human Rights: The Case of Forced Labour in Myanmar (Burma)." *International Labour Review*. Vol. 137. Issue. 3. International Labour Office: Geneva. Hal. 391-409.
- Christensen, Ed Karen & David Levinson. 2002. "Myanmar – Human Rights." *Encyclopedia of Modern Asia*. Vol. 4. Charles Scribner's Sons: New York. Hal. 265-268.
- Elsea, Zachary T. 2003. "Myanmar's Facade." *Harvard International Review*. Vol. 25. Issue. 01. Harvard International Relations Council: Cambridge. Hal. 13-14.
- Firnas, M. Adian. *Jurnal Universitas Paramadina: Prospek Demokrasi di Myanmar*. 2003. Vol. 2 No. 2. Januari. Hal. 129-130.
- Kinley, David & Wilson, Trevor. 2007. "Engaging a Pariah, Human Rights Training In Burma/Myanmar." *Human Rights Quarterly*. Vol. 2. Issue. 2. Mei. Johns Hopkins University: Baltimore. Hal. 368-402.
- Okamoto, Ikuko. 2013. *Comment on "Toward Myanmar's New Stage of Development: Transition from Military Rule to the Market"*. *Asian Economic Policy Review*. Vol 8. Issue 1. Hal: 120–121.
- Taylor, Robert H. 2013. *Southeast Asian Studies: Myanmar In 2012, mhyaw ta lin lin or Great Expectations*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore. Hal: 191-203. Dikutip dari: <http://e-resources.pnri.go.id:2056/docview/1508526113>. Tanggal: 11 April 2014. Pukul: 14.24
- Turnell, Sean. "Myanmar In 2010." *Asian Survey*. Vol 51. Issue 1. 02/2011, Hal 148 - 154
- Turnell, Sean "Myanmar's Fifty-Year Authoritarian Trap." *Journal of International Affairs*. 2011. Vol. 65. Issue. 1. Hal. 79.
- Gwen Robinson & Robin Harding. 2012. *Financial Times: Myanmar finalises investment law*. The Financial Times Limited: London.
- Jelang Kunjungan Obama, Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan*. Solopos.Com. Dikutip dari: <http://www.solopos.com/2012/11/15/jelang-kunjungan-obama-myanmar-bebaskan-ratusan-tahanan-348020>.
- Kurnianto, Fajar. *Prospek Demokrasi Myanmar Setelah Pemilu*. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/tribunners/2010/11/27/prospek-demokrasi-myanmar-setelah-pemilu>. 4 Desember 2013. pukul. 12.30.
- Krisman, Khanisa : *Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar*. Diakses dari: <http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalan-demokrasi-myanmar.html>. 4 Desember 2013. pukul 13.00
- Myanmar Profile*, diakses dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12990563>, 4 desember 2013. Pukul 09.30
- Press Freedom Index*. Reporters Without Borders. Dikutip dari: <http://en.rsf.org/spip.php?page=classe>

- ment&id_rubrique=1034. Tanggal: 09 April 2014. Pukul 13.05.
- Purwanti, Niken Ari. 2012. *Parlemen Myanmar Loloskan UU Investasi Asing*. Solopos. Dikutip dari:<http://www.solopos.com/2012/09/07/parlemen-myanmar-loloskan-uu-investasi-asing-326258>
- Wingfield, Tom. 2000. *“MYANMAR: Political Stasis and a Precarious Economy.”* Southeast Asian Affairs. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.
- Zahroh, Fathimatuz: *Biografi Thein Sein*. Diakses dari: <http://profil.merdeka.com/mancanegara/t/thein-sein/>. 4 Desember 2013. Pukul 14.27
- “*Press Freedom Indeks 2010.*” Reporters Without Borders. Diakses dari: http://en.rsf.org/spip.php?page=classification&id_rubrique=1001. Tanggal 27 Maret 2014. Pukul: 22.35.
1994. *“The Slaves From Myanmar.”* The Economist. The Economist Intelligence Unit: London. Hal. 32.
2001. *“Myanmar: General Outlook.”* Institute of Southeast Asian Studies: Singapore.
2006. *“Myanmar Economy: Concern Over Labour Rights.”* EIU ViewsWire. The Economist Intelligence Unit: New York.
2012. *“New Super Cabinet Drives Rapid Change.”* Ft.Com. The Financial Times Limited: London.
2012. *“The Rule Of Myanmar: Challenges and Prospects”*. Report of the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI). International Bar Association: London.
2012. *Myanmar Longgarkan Sensor*. DW Akademie. Dikutip dari: <http://www.dw.de/myanmar-longgarkan-sensor/a-16178940-1>. Tanggal: 09 April 2014. Pukul: 12.18
2013. *Annual Report 2013*. Assistense Associations for Political Prisoners. Dikutipdari:[http://www.aappb.org/Annual_Report_2013\(Eng\).pdf](http://www.aappb.org/Annual_Report_2013(Eng).pdf). Tanggal: 09 April 2014. Pukul 10.34.
- . Tanggal: 12 April 2014. Pukul: 15.22.